

**LAPORAN BULANAN BPP PROVINSI PAPUA
TENGAH BULAN Mei 2025**



BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

**WILAYAH BPP PAPUA TENGAH
POKJA PAPUA SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF DAN POLHUKAM
TAHUN 2025**





**PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH**

JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE
Kontak : (0984) 22350; Email: bpp.papteng@gmail.com
Website : <https://badanpengarahpapua.go.id/>

Nomor : 05/V/2025/BPP.PT
Lampiran : -
Perihal : Laporan Kegiatan BPP
Bulan mei 2025

Nabire, 28 Mei 2025
Kepada
Yth. **Kanwil DJPB
Provinsi Papua**

di
Jayapura.

Surat Pengantar

1. Berdasarkan :
 - a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 - b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 tentang OTK BP3OKP sesuai Pasal 2 dan 3 Tugas dan Fungsi BP3OKP.
2. Laporan Bulanan BP3OKP Papua Tengah Bulan Mei 2025
Demikian untuk menjadi Maklum.

**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH
(BP3OKP)**



IRJEN POL (P) DRS. PIETRUS WAINE, S.H., M.HUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA).....	5
B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK.....	5
C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN.....	6
D. KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	6

Ringkasan Eksekutif

BP3OKP/BPP adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus dan Badan Khusus yang berkedudukan langsung dibawah Wakil Presiden. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPP dalam melaksanakan SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi) maka terdapat beberapa Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh Anggota BPP Papua Tengah Bersama Dengan Pokja di Bulan Mei ini diantaranya adalah :

1. Anggota BPP Papua Tengah

- Rapat evaluasi daerah otonomi baru bersama Komisis II DPR RI dan Dirjen OTDA Kemendari di Timika. (01/05/2025)
- Menghadiri Musyawarah Perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua Tengah tahun 2025 di kantor gubernur papua tengah(08/05/2025 s.d 09/05/2025)
- Audiensi kemenham bersama BP3OKP PPT dan BP3OKP Papua Barat daya. (15 mei 2025) di jakarta)
- Rapat koordinasi berkelanjutan dalam upaya percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengangguran di provinsi papua tengah melalui sekolah terintegrasi BLK berbasis pendidikan vokasi SMK.(22 Mei 2025)
- Pelaksana Sosialisasi anti korupsi 6 Gubernur, 6 BPP, Bupati, walikota se-tanah papua (daring/daring) 23 mei 2025
- Rapat Koordinasi kerja MRP (26 Mei 2025)
- Rapat Paripurna DPR (27 Mei 2025)
- Persidangan Desk Tematik Kewilayaan Musrenbangnas Tahun 2025 daring/online (27 mei 2025)
- Penyerahan surat permintaan laporan penggunaan dana otonomi khusus papua tengah tahun 2024 oleh anggota BP3OKP kepada Kasub keoutsus bapperinda provinsi papua Tengah (28 mei 2025)

2. Pokja Papua Produktif

- Rapat evaluasi daerah otonomi baru bersama Komisis II DPR RI dan Dirjen OTDA Kemendari di Timika. (01/05/2025)
- Menghadiri Musyawarah Perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi papua tengah tahun 2025 di kantor gubernur papua tengah(08/05/2025 s.d 09/05/2025)
- Rapat mediasi sengketa tanah distrik yaro di pimpin oleh bupati nabire, permasalahan antara marga boma, kegou, mekei dan makai di distrik Nabire Barat. (15/05/2025)
- Mengikuti penyerahan bantuan tempat jualan kios kontainer kepada ibu-ibu orang asli papua (OAP) bagi perjual pinang dan sembako di kabupaten nabire. (16 Mei 2025)
- Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)
- Rapat bersama World Resources Institute (WRI) (16/05/2025)
- Undangan Rapat bersama Skala 19- 21 mei 2025 di makassar
- Sosialisasi anti korupsi (daring/daring) 23 mei 2025 (tujuan kegiatan tersebut)

3. Pokja Papua sehat

- Menghadiri pelantikan komisi pemberantasan HIV/AIDS kabupaten Paniai

- undangan dari bupati paniai untuk BPP Pokja Papua Sehat. (02 Maret 2025).
- Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)
 - Undangan Rapat bersama Skala 19- 21 mei 2025 di makassar.
4. Pokja Papua Cerdas
- Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)
 - Rapat koordinasi berkelanjutan dalam upaya percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengurangan di provinsi papua tengah melalui sekolah terintegrasi BLK berbasis pendidikan vokasi SMK.(22 Mei 2025).
5. Pokja Polhukam
- Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)
 - Rapat koordinasi berkelanjutan dalam upaya percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengurangan di provinsi papua tengah melalui sekolah terintegrasi BLK berbasis pendidikan vokasi SMK.(22 Mei 2025).
 - Sosialisasi anti korupsi (daring/daring) 23 mei 2025
 - Persidangan Desk Tematik Kewilayaan Musrenbangnas Tahun 2025 daring/online (27 mei 2025)
 - Penyerahan surat permintaan laporan penggunaan dana otonomi khusus papua tengah tahun 2024 oleh anggota BP3OKP kepada Kasub keoutsus bapperinda provinsi papua Tengah (28 mei 2025)

Program-Program kerja yang telah dijalankan Oleh BPP bertujuan untuk tercapainya visi-misi BPP sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2021 “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil dan Sejahtera” dengan salah satu lainnya. Demikianlah beberapa Program Kerja BPP Provinsi Papua Tengah di Bulan Mei yang dapat kami sampaikan.

A. KEGIATAN STRATEGIS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)

Adapun Kegiatan anggota BPP Provinsi Papua Tengah bersama dengan Pokja selama bulan Mei 2025 yaitu antara lain sebagai berikut :

No	KEGIATAN PRIORITAS BPP PAPUA TENGAH (ANGGOTA DAN POKJA)	MISI RIPP
01	<ul style="list-style-type: none">➤ Audiensi kementerian bersama BP3OKP PPT dan BP3OKP Papua Barat daya. (15 mei 2025) di jakarta➤ Sosialisasi anti korupsi (daring/daring) 23 mei 2025	Anggota BPP PPT
02	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)	Papua Cerdas
03	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)	Papua Produktif
04	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)	Papua Polhukam
05	<ul style="list-style-type: none">➤ Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)	Papua Sehat

1. Anggota BPP Provinsi Papua Tengah

- Rapat evaluasi daerah otonomi baru bersama Komisi II DPR RI dan Dirjen OTDA Kemendari di Timika. (01 Mei 2025)



- Menghadiri Musyawarah Perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua Tengah tahun 2025 di kantor gubernur Papua Tengah (08/05/2025 s.d 09/05/2025)



➤ Rapat bersama Kementerian Pertahanan RI

Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, dipimpin Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, mengadakan audiensi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) pada Kamis (15/5), di kantor Biro Infohan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam menyebarkan informasi publik mengenai pertahanan dalam pembangunan Papua. Diskusi mencakup sinergi lintas instansi melalui tiga pilar utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. BP3OKP mempresentasikan rencana aksi komprehensif di berbagai sektor prioritas, menekankan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra internasional untuk publikasi yang konstruktif dan berbasis data. Brigjen TNI Frega mengapresiasi paparan tersebut dan menegaskan komitmen Biro Infohan untuk mendukung informasi yang akurat, seimbang, dan solutif terkait pertahanan dan keamanan di Papua.



➤ Rapat koordinasi berkelanjutan dalam upaya percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengangguran di provinsi papua tengah melalui sekolah terintegrasi BLK berbasis pendidikan vokasi SMK.(22 Mei 2025)



- Anggota BP3OKP sebagai Pelaksana Sosialisasi anti korupsi 6 Gubernur, 6 Bpp, bupati dan walikota setanah papua (daring/daring) 23 mei 2025

Tujuan Sosialisasi Anti Korupsi di Pemerintah Daerah Se-Tanah Papua

1. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman tentang Korupsi
2. Membangun Budaya Anti Korupsi
3. Memperkuat Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan
4. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
5. Mengajak masyarakat adat, komunitas lokal, dan pelajar untuk berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi
6. Meningkatkan Koordinasi antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum.



- Rapat Koordinasi kerja MRP (26 Mei 2025)
Penyampain pemikiran terhadap rencana amandemen PP Nomor 54 Tahun 2004 dan PP Nomor 64 Tahun 2008 tentang majelis rakyat papua.



- Rapat Paripurna DPRD (27 mei 2026)
Dalam rangka pelantikan DPR provinsi papua tengah priode 2024-2025



- Persidangan Desk Tematik Kewilayaan Musrenbangnas Tahun 2025 daring/online (27 mei 2025).



- Terdapat beberapa poin yang diambil dalam Persidangan Desk Tematik Kewilayaan Musrenbangnas Tahun 2025 yaitu.
 1. Terdapat beberapa usulan dalam bidang kesehatan yang belum di rekomendasikan kemenkes.
 2. Terdapat beberapa usulan dalam bidang pendidikan seperti anak tidak sekolah dan anak putus sekolah yang direkomendasikan membuat sekolah berbasis kerja namun belum direkomendasikan kemendikbutristek.
 3. Pemasangan lampu di daerah 3T yang belum direkomendasikan karena beberapa alasan keamanan.
- Penyerahan surat permintaan laporan penggunaan dana otonomi khusus papua tengah tahun 2024 oleh anggota BP3OKP kepada Kasub keoutsus bapperinda provinsi papua Tengah (28 mei 2025)



2. Pokja Papua Produktif

- Rapat evaluasi daerah otonomi baru bersama Komisis II DPR RI dan Dirjen OTDA Kemendari di Timika. (01 Mei 2025)



- Menghadiri Musyawarah Perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Papua Tengah tahun 2025 di kantor gubernur Papua Tengah (08/05/2025 s.d 09/05/2025)



- Rapat mediasi sengketa tanah distrik yaro di pimpin oleh bupati nabire, permasalahan antara marga boma, kegou, mekei dan makai di distrik Nabire Barat.



- Mengikuti penyerahan bantuan tempat jualan kios kontainer kepada ibu-ibu orang asli papua (OAP) bagi perjual pinang dan sembako di kabupaten nabire. (16 Mei 2025)



- Rapat bersama World Resources Institute (WRI) (16/05/2025)



- Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)

BP3OKP Perwakilan Papua Tengah menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua, dan 8 Kabupaten se Provinsi Papua Tengah untuk membahas percepatan Akses dan mutu pendidikan yang merata serta penyiapan daya saing kerja melalui Pendidikan Vokasi yaitu SMK Terintegrasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Papua Tengah.



- Undangan Rapat bersama Skala 19- 21 mei 2025 di makassar, (tujuan kegiatan tersebut)
 - Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan daerah terhadap kebijakan dan indikator SPM.
 - Mendorong penyusunan rencana aksi implementasi SPM secara kolaboratif dan berbasis data.
 - Memperkuat komitmen lintas sektor dan provinsi dalam mencapai target SPM di wilayah Papua.
 - Penguatan pemahaman perangkat daerah dalam melakukan analisis dan perhitungan kebutuhan pembiayaan SPM, merumuskan kebijakan dan strategi jangka menengah;
 - Mendorong pengintegrasian Renaksi SPM kedalam dokumen perencanaan daerah
 - Penyepakatan tindaklanjut penyusunan Renaksi tiap provinsi.



- Rapat koordinasi berkelanjutan dalam upaya percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengurangan di provinsi papua tengah melalui sekolah terintegrasi BLK berbasis pendidikan vokasi SMK.(22 Mei 2025)



- Mengingikti Sosialisasi anti korupsi (daring/daring) 23 mei 2025



Mari kita jadikan integritas sebagai dasar pijakan setiap kebijakan, bukan sekadar slogan, tetapi prinsip kerja dan budaya organisasi. Karena hanya dengan integritas, kita bisa membawa pembangunan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga

- Rapat Koordinasi kerja MRP (26 Mei 2025)
Ketertiban MRP dalam proses amandemen regulasi, khususnya terkait otonomi khusus dan penguatan kelembagaan adat adalah langkah penting dalam memastikan bahwa suara orang asli Papua.



3. Pokja Papua Sehat

- Menghadiri pelantikan komisi pemberantasan HIV/AIDS kabupaten Paniai undangan dari bupati paniai untuk BPP Pokja Papua Sehat. (Jumat 02 Maret 2025).
Ketua KPA provinsi Papua menekan pentingnya pendataan ulang penderita dan juga perkuat upaya pencegahan, edukasi dan penghapusan stigma mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Semua yang sudah dipilih jadi Pengurus KPA adalah pekerja kemanusiaan bukan mencari keuntungan bagaimana kita bekerja untuk menyadarkan betapa pentingnya memahami penularan penyakit HIV/AIDS sehingga beberapa tahun kemudian tidak terjadi penularan yang signifikan atau berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.



- Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025).
Hal penting yang dibahas dalam Rakor ini adalah tindak lanjut hasil Audensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diantaranya; Percepatan akses bagi anak tidak sekolah sebanyak 205.164, anak putus sekolah, anak daerah konflik dan anak layanan pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan ekonomi Masyarakat bagi daerah 3T.



- Undangan Rapat bersama Skala 19- 21 mei 2025 di makassar (tujuan kegiatan tersebut)
 - Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan daerah terhadap kebijakan dan indikator SPM.
 - Mendorong penyusunan rencana aksi implementasi SPM secara kolaboratif dan berbasis data.
 - Memperkuat komitmen lintas sektor dan provinsi dalam mencapai target SPM di wilayah Papua.
 - Penguatan pemahaman perangkat daerah dalam melakukan analisis dan perhitungan kebutuhan pembiayaan SPM, merumuskan kebijakan dan strategi jangka menengah;
 - Mendorong pengintegrasian Renaksi SPM kedalam dokumen perencanaan daerah
 - Penyelesaian tindak lanjut penyusunan Renaksi tiap provinsi.



4. Pokja Papua Cerdas

- Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025)

BP3OKP Perwakilan Papua Tengah menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Papua, dan 8 Kabupaten se Provinsi Papua Tengah untuk membahas percepatan Akses dan mutu pendidikan yang merata serta penyiapan daya saing kerja melalui Pendidikan Vokasi yaitu SMK Terintegrasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Papua Tengah.

P3K dan PPG,revitalisasi Klose Pendidikan Guru (KPG) Khas papua, Angka pengangguran yang tinggi, Kemiskinan ekstrim, tingginya stunting, Pelayanan kesehatan dasar tidak maksimal, Tingginya penyakit masyarakat (minum keras, perkelahian, aibon, dll),” ujar BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol (Purn) Petrus Waine usai rapat evaluasi

Hal penting yang dibahas dalam Rakor ini adalah tindak lanjut hasil Audensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diantaranya; Percepatan akses bagi anak tidak sekolah sebanyak 205.164, anak putus sekolah, anak daerah konflik dan anak layanan pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan ekonomi Masyarakat bagi daerah 3T.

Salah satu lokusnya adalah Distrik Kapiroya, Kabupaten Deiyai untuk pelayanan anak tidak sekolah di daerah 3T, Revitalisasi 2 SD dan 2 SMP di Bilogai dan Sugapa melalui bantuan Kementerian Pendidikan dalam tahun anggaran 2025 ini untuk menampung anak-anak di kampung dan distrik daerah konflik untuk dipusatkan ke ibu kota kabupaten Intan Jaya” tutur mengatakan poin kedua yang dibahas adalah percepatan pendidikan bermutu untuk semua sesuai kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Papua Tengah. Kami juga akan mendorong daya saing kerja pendidikan dan kecakapan hidup bagi penduduk usia produktif melalui SMK terintegrasi BLK Komunitas.LKP dan PKBM berbasis 5 Yayasan Pelopor Pendidikan di Tanah Papua,” ujar Waine.

Selain itu dalam rapat ini juga membahas pengusulan data guru P3K yang memenuhi masa kerja minimal 3 tahun, memiliki NUPTK dan saat ini aktif mengajar tapi tidak linier kualifikasi pendidikan dengan mata Pelajaran yang dia ampuh di satuan pendidikan untuk diusulkan ke Kementerian Pendidikan untuk dapat diprioritaskan dalam pengangkatan Formasi Khusus. Juga Percepatan Kelulusan PPG Bagi guru yang telah memenuhi syarat namun selama ini belum berkesempatan lulus bersama BPG Papua,” imbuh perwakilan BP3OKP Papua Tengah. BP3OKP juga siap



- Rapat koordinasi berkelanjutan dalam upaya percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengurangan di provinsi papua tengah melalui sekolah terintegrasi BLK berbasis pendidikan vokasi SMK.(22 Mei 2025).



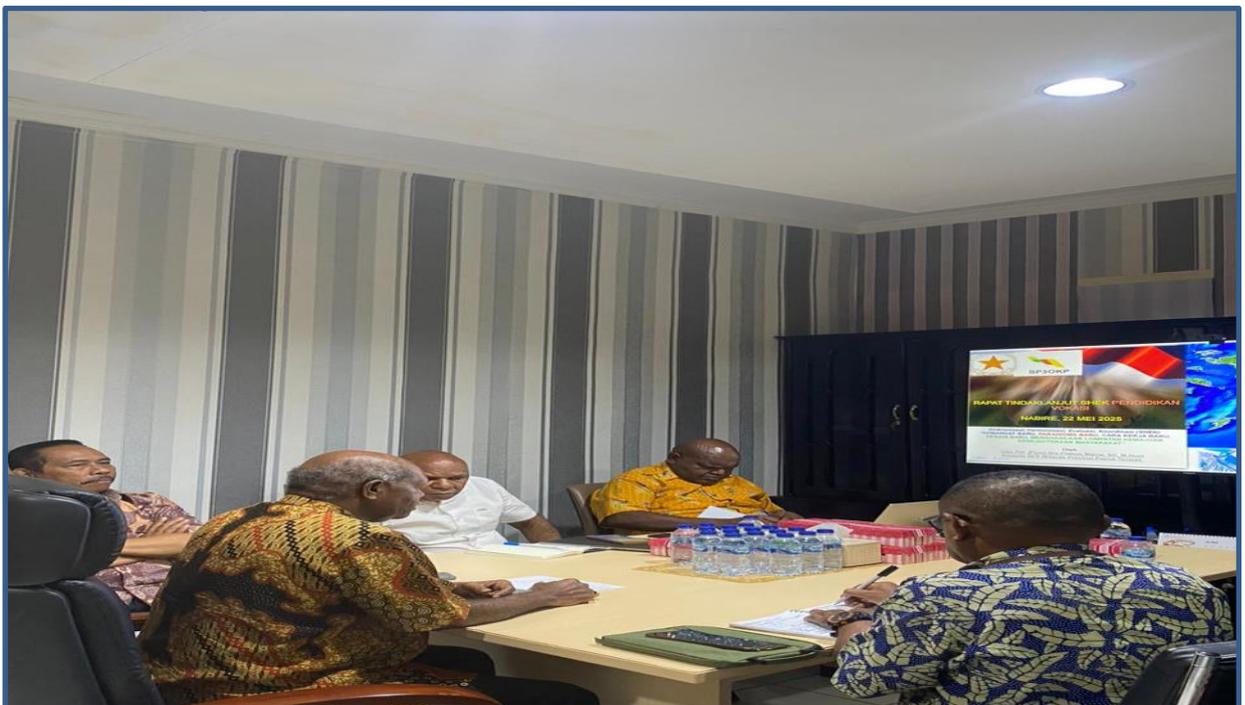
5. Pokja Politik Hukum dan keamanan (Polhukam)

- Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Tindak Lanjut rapat bersama Kemdikdasmen (16/05/2025).

beberapa masalah itu diantaranya; Anak tidak sekolah, Putus Sekolah, Layanan pendidikan bagi anak daerah konflik yang belum maksimal, banyak guru belum lulus tes P3K dan PPG, revitalisasi Klose Pendidikan Guru (KPG) Khas Papua, Angka pengangguran yang tinggi, Kemiskinan ekstrim, tingginya stunting, Pelayanan kesehatan dasar tidak maksimal, Tingginya penyakit masyarakat (minum keras, perkelahian, aibon, dll),” ujar BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol (Purn) Petrus Waine usai rapat evaluasi di aula KPPN Nabire, Jumat, (16/5/2025).



- ekstrem dan pengangguran di provinsi Papua Tengah melalui sekolah terintegrasi BLK berbasis pendidikan vokasi SMK. (22 Mei 2025).

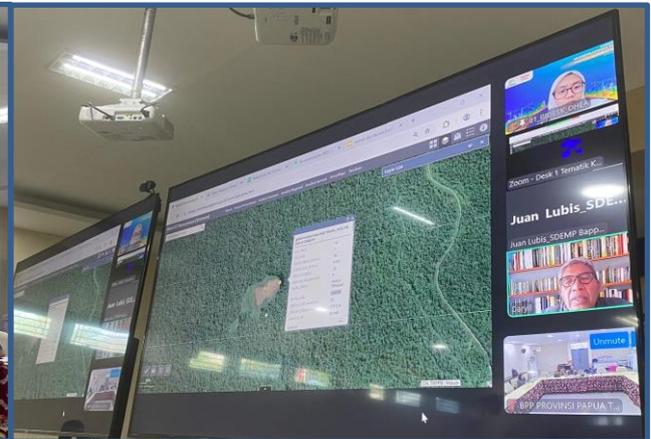


- Mengingikti Sosialisasi anti korupsi (daring/daring) 23 mei 2025



Korupsi merupakan virus yang sangat berbahaya dan mematikan, serangannya pada hati, jantung dan otak manusia. Akibatnya adalah mati rasa, mati akal sehat.

- Persidangan Desk Tematik Kewilayaan Musrenbangnas Tahun 2025 daring/online (27 mei 2025).



- Penyerahan surat permintaan laporan penggunaan dana otonomi khusus papua tengah tahun 2024 oleh anggota BP3OKP kepada Kasub keoutsus bapperinda provinsi papua Tengah (28 mei 2025)



Demikian Rangkuman hasil yang di capai dari kegiatan BP3OKP di Bulan Mei 2025 sebagai berikut.

B. CAPAIAN PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS

Belum terdapat Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Strategis Daerah (PSD).

C. REKOMENDASI ANGGOTA BPP TERKAIT PELAKSANAAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA WILAYAH PAPUA TENGAH

Berdasarkan hasil evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah selama pelaksanaan Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi selama bulan Mei 2025, memberikan Rekomendasi sebagai Upaya optimalisasi pelayanan percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Ada dua rekomendasi yaitu :

1. Sesuai Tusi dan Fungsi SHEK BPP

Adapun usulan yang disampaikan anggota BPP agar tercapainya Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Tengah antara lain:

- a Banyak program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kelompok kerja (papua sehat,papua cerdas,papua produktif dan papua polhukam) namun tidak dibarengin dengan dukungan biaya;
- b Dari kesimpulan rapat SHEK di 8 wilayah adat dan provinsi, kami akan kawal setiap program yang kerja 5 tahun kedepan gubernur dan 8 bupati di papua tengah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, produktifitas dan politik hukum dan keamanan;
- c Berkaitan Rapat SHEK penyelesaian batas wilayah adat antara suku mee & suku kamoro/wee akan berlanjut dan atau diprioritaskan karena kami akan mengundang suku kamoro/wee untuk menyampaikan sesuai versi mereka yang tinggal dibatas wilayah adat tersebut;
- d Percepatan penuntasan kemiskinan dan pengangguran ekstrim di Provinsi Papua Tengah, maka program SMK Terintegrasi Balakai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Sangkar Kegiatan Belajar (SKB)/PKBM menjadi Prioritas dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga dan bersa
- e PP 106 tentang kewenangan pengelolaan pendidikan menengah sebagaimana diatur dalam lampiran PP 106 agar dapat direvisi dan pengelolaan kewenangan dialihkan ke Provinsi, karena Kabupaten mengalami devisa anggaran ;
- f Pembagian presentasi anggaran OTSUS sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2021, dapat direview untuk tidak berpatokan pada presentasi, namun diberi keleluasaan kepada Pemda untuk dapat menyesuaikan kondisi wilayah serta kebutuhan prioritas dari masing- masing Kabupaten/kota;
- g Berdasarkan huruf c.d dan e diatas, jika tidak mendapat dukungan penyelesaian maka akan berdampak pada masalah kejahatan konvensional/tradisional seperti pemalangan, pembunuhan,

perampokan, pembakaran, pengrusakan kantor-kantor public/pemerintah dan swasta, pencurian, narkoba, dan lain sebagainya.

2. Tata Kelola Sekretaritan BPP

BP3OKP sebagai lembaga Nonlembaga Negara yang melaksanakan Tugas dan Fungsi SHEK mengalami kendala dalam tata Kelola Keuangan sehingga BP3OKP terkesan tidak terlihat kinerja.

Berikut beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Anggota dan Pokja BPP Papua Tengah sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya Hak Fasilitas berupa kendaraan, perumahan, asuransi kerja, THR hari-hari besar bagi Anggota dan Kelompok Kerja dan sekretariat BPP Papua sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Perpres No 121 tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (BP3OKP)
- b. Dalam Buku Saku tentang Dukungan Administratif dari Sekretariat Badan Pengarah Papua belum menguraikan Harga Satuan Perjalanan Dinas sesuai dengan standar biaya tingkat kemahalan di wilayah Papua Tengah sehingga sangat menghambat pelaksanaan percepatan program dan kegiatan BPP Papua Tengah;
- c. Belum tersedianya dana Cadangan/Kontigensi (keadaan/situasi darurat yang segera ditangani/direspon oleh BPP Papua Tengah, sehingga kasus pembunuhan, kasus perkelahian antar suku, pemalangan jalan, korban akibat kecelakaan, bencana alam mengalami keterlambatan dalam penanganannya;
- d. Banyak kegiatan BPP Papua Tengah yang semestinya harus diketahui oleh Masyarakat publik, namun selama ini tidak terpublikasi sama sekali dikarenakan belum tersedianya biaya Publikasi/Media di KPPN Nabire;
- e. Kedudukan BPP Papua di masing-masing Provinsi, sesuai pasal 68.a UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, agar disamakan dengan Badan-Badan Khusus lain yaitu MRPT, DPRPPT, DPRK, BP3OKP dan DPD RI dalam kedudukan dan penganggaran.

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan Kegiatan BPP Papua Tengah di bulan Mei 2025, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan SHEK diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dengan semua pihak terutama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah, MRPPT, DPRPT, DPRDPT, dan Para Bupati serta mitra pembangunan lainnya.

Demikian Laporan Bulanan yang dapat Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.